

Negosiasi Politik Dalam Pembentukan Koalisi di Indonesia : Studi Kasus Pilpres 2024

Nur Fadilah Sidqi¹, Muhammad Ikhlasul Amal², Muthi'a Hafidza³, Pia Khoirotun Nisa⁴

¹²³⁴ Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

muthihafidza@gmail.com,
nurfadilahsidqi17@gmail.com,
ipulnoh21@gmail.com,
pia.khoirotun@uinjkt.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pilpres 2024 menjadi momentum penting dalam dinamika komunikasi politik di Indonesia, terutama dalam proses pembentukan koalisi yang ditandai oleh negosiasi formal dan informal antarpartai. Penelitian ini berfokus pada bagaimana negosiasi politik berlangsung dalam pembentukan koalisi, dengan menyoroti strategi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan pengalaman Partai Gelora Indonesia sebagai partai baru. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus dengan wawancara pengurus DPW Partai Gelora, penelitian ini menggunakan teori *principled negotiation* dari Fisher dan Ury serta teori koalisi politik dari Riker dan Lijphart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kesatuan visi, fleksibilitas partai, dan kekuatan elektoral figur calon. Temuan juga menegaskan bahwa pragmatisme politik mendominasi proses negosiasi, di mana kepentingan strategis dan kalkulasi kekuasaan lebih diutamakan ketimbang ideologi. Meskipun pola ini dapat menciptakan stabilitas jangka pendek, ia berpotensi melemahkan idealisme politik serta

partisipasi publik. Karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan elektoral dan nilai-nilai demokrasi substantif.

Kata Kunci: Negosiasi Politik, Koalisi, Pilpres 2024

ABSTRACT

The 2024 Presidential Election in Indonesia highlighted a shift toward pragmatic and transactional political negotiations, particularly in coalition formation. This study explores how political negotiations unfolded, identifying key actors, communication strategies, and success factors. Focusing on the Indonesia Maju Coalition (KIM) and the Indonesian Gelora Party's role as a newcomer, the research adopts a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were gathered through literature review and interviews with Gelora Party leaders in Bengkulu. Using Fisher and Ury's principled negotiation theory alongside coalition theories by Riker and Lijphart, the study finds that shared vision, party adaptability, and candidate electability significantly influenced coalition success. Although pragmatic negotiations may ensure short-term political stability, they risk eroding ideological commitments and public engagement. Thus, balancing electoral goals with democratic values remains essential.

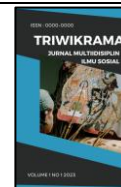
Keywords: Political Negotiation, Coalition, 2024 Presidential Election

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menandai babak baru dalam dinamika politik nasional, di mana negosiasi antarpartai menjadi salah satu elemen sentral dalam pembentukan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



koalisi. Tidak hanya menjadi ajang adu gagasan dan program, Pilpres 2024 memperlihatkan bagaimana kompromi politik, kalkulasi kekuasaan, serta pertukaran kepentingan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan menuju pencalonan dan pemenangan kandidat. Koalisi bukan lagi sekadar pertemuan ideologis, melainkan lebih didorong oleh pertimbangan strategis untuk meraih kemenangan elektoral. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya memahami mekanisme dan dinamika negosiasi politik dalam konteks kontemporer Indonesia.

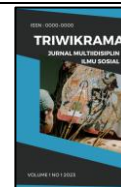
Negosiasi politik dalam pembentukan koalisi sering kali berlangsung di balik layar, melibatkan aktor-aktor utama partai politik, elite nasional, serta jaringan kepentingan lain seperti pengusaha, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Proses ini memperlihatkan bahwa koalisi tidak hanya dibangun berdasarkan kesamaan visi misi, melainkan juga faktor pragmatis seperti pembagian kekuasaan, penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta jaminan posisi strategis di pemerintahan pasca-pemilu¹. Di Pilpres 2024, kontestasi politik memperlihatkan bagaimana berbagai partai harus menegosiasikan posisi mereka secara fleksibel dalam menghadapi dinamika politik yang cepat berubah.

Pilpres 2024 juga menunjukkan adanya pola baru dalam negosiasi politik, di mana partai-partai menyesuaikan strategi mereka dengan realitas elektoral yang lebih kompleks. Misalnya, faktor elektabilitas individu calon semakin mendominasi perhitungan, sehingga partai yang sebelumnya kuat secara struktural kini harus mempertimbangkan popularitas figur publik dalam menentukan arah koalisinya. Dalam konteks ini, negosiasi politik menjadi semakin bersifat transaksional, dengan tawar-menawar posisi serta konsesi politik menjadi kunci dalam membangun dan mempertahankan koalisi besar.

Lebih jauh, negosiasi politik pada Pilpres 2024 memperlihatkan adanya pengaruh kuat dari "king maker" atau aktor-aktor politik senior yang meskipun tidak mencalonkan diri, tetap memainkan peran penting dalam mengatur peta koalisi. Mereka menggunakan kekuatan jaringan politik, sumber daya finansial, dan pengaruh publik untuk mengarahkan pilihan partai-partai dalam pembentukan koalisi². Dalam konteks ini, negosiasi tidak hanya berlangsung di tingkat formal, melainkan juga melalui jalur-jalur informal yang sulit dipetakan secara kasat mata. Hal ini memperkaya kompleksitas studi tentang koalisi politik di Indonesia.

¹ Wiley Online Library. (2015). How and When Do Presidents Influence the Duration of Coalition Negotiations? *European Journal of Political Research*, 54(4), 1–25. H.8

² Setiawan, A. (2021). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. h.276



Kondisi ini mengundang pertanyaan mendalam tentang sejauh mana negosiasi dalam pembentukan koalisi merepresentasikan aspirasi rakyat atau justru lebih mencerminkan kepentingan elite politik. Banyak kritik mengemuka bahwa pembentukan koalisi lebih bertujuan mempertahankan status quo dan mengakomodasi kepentingan jangka pendek, ketimbang membawa perubahan substansial bagi perbaikan demokrasi. Oleh karena itu, studi tentang negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pada Pilpres 2024 menjadi penting untuk menilai kesehatan demokrasi Indonesia dan mengevaluasi praktik-praktik politik yang berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana negosiasi politik terjadi dalam proses pembentukan koalisi di Pilpres 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi aktor-aktor utama, mekanisme negosiasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesepakatan koalisi, serta implikasi dari pola negosiasi ini terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami fenomena koalisi politik di era demokrasi elektoral modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Pragmatisme Politik

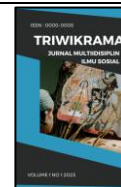
Pragmatisme politik merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan hasil praktis dan pencapaian tujuan jangka pendek, seperti kemenangan elektoral dan akses kekuasaan, daripada kesetiaan terhadap prinsip ideologis murni³. Dalam konteks ini, partai-partai politik lebih cenderung melakukan negosiasi dan membentuk koalisi berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh, baik dalam hal kekuasaan, sumber daya, maupun posisi politik, daripada berdasarkan kesamaan ideologi atau platform kebijakan. Konsep pragmatisme politik ini sangat erat kaitannya dengan teori rational choice, yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan politik, termasuk dalam konteks koalisi, merupakan upaya untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan, baik itu dalam bentuk kekuasaan, akses ke sumber daya, ataupun posisi yang lebih menguntungkan dalam pemerintahan.

Dalam praktiknya, pragmatisme politik di Indonesia terwujud dalam pembentukan koalisi taktis menjelang Pilpres, Pilkada, dan Pemilu Legislatif (Pileg). Koalisi semacam ini sering kali

³ Moghimifar, F., Li, Y.-F., Thomson, R., & Haffari, G. (2024). Modelling Political Coalition Negotiations Using LLM-based Agents. *arXiv preprint arXiv:2402.11712*.h.33

*Corresponding author

E-mail addresses: zulkhrufii@gmail.com



dibentuk dengan mempertimbangkan elektabilitas calon atau kekuatan lokal partai, bukan kesesuaian ideologi di antara anggota koalisi. Fenomena ini sangat terlihat pada koalisi partai-partai yang terbentuk secara dinamis menjelang Pemilu 2024, di mana partai-partai dengan berbagai latar belakang ideologi justru bersatu berdasarkan kebutuhan untuk memenangkan pemilu dan mendapatkan akses ke kekuasaan⁴. Hal ini juga dapat dilihat pada fenomena calon tunggal dalam beberapa Pilkada, di mana koalisi dibentuk dengan tujuan untuk mengamankan posisi inkumbent yang berkuasa, seringkali mengesampingkan kesamaan ideologi atau program kerja antara partai-partai yang berkoalisi.

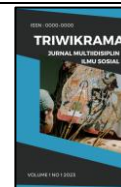
Beberapa dimensi penting dari pragmatisme politik yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah orientasi partai dalam mencapai kemenangan elektoral, aliansi yang dibentuk semata-mata untuk memperoleh jatah kursi kabinet atau sumber daya politik, serta praktek negosiasi patronase, di mana jabatan politik, anggaran, dan proyek infrastruktur dipertukarkan sebagai komoditas dalam tawar-menawar politik. Dalam banyak kasus, koalisi-koalisi yang dibentuk dengan orientasi pragmatis ini bersifat sementara dan sangat bergantung pada hasil pemilu, sehingga sering kali mengarah pada volatilitas aliansi dan fragmentasi sistem multipartai. Dalam konteks ini, analisis lebih lanjut tentang pengaruh pragmatisme politik terhadap kepercayaan publik menjadi penting, terutama terkait dengan persepsi bahwa jabatan-jabatan publik dikendalikan oleh kepentingan politik semata, yang dapat mengurangi legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.

Teori Negosiasi Politik: Principled Negotiation

Teori principled negotiation yang dikembangkan oleh Fisher, Ury, dan Patton (1981) memberikan panduan penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam situasi negosiasi politik. Teori ini menekankan empat pilar utama yang dapat diterapkan dalam konteks negosiasi pembentukan koalisi politik. Pertama, pisahkan orang dari masalah, yang bertujuan untuk menghindari konflik personal yang dapat merusak proses negosiasi⁵. Dalam hal ini, fokus utama adalah pada isu substantif dan bukan pada hubungan antar individu atau kelompok. Kedua, fokus pada kepentingan, bukan posisi, yang berarti bahwa aktor-aktor politik harus menggali kebutuhan dasar di balik tuntutan mereka, bukan sekadar bersikukuh pada posisi

⁴ Putri, A. K., & Wahyuni, R. (2024). Komunikasi Negosiasi Wajah Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan Menuju Pemilihan Presiden 2024. *ResearchGate*.h.23

⁵ Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.h.45



mereka. Dengan cara ini, negosiasi dapat menciptakan solusi win-win yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ketiga, ciptakan opsi untuk keuntungan bersama, yang melibatkan eksplorasi alternatif solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam koalisi. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan ruang bagi kesepakatan yang lebih luas dan inklusif. Terakhir, gunakan kriteria objektif, yang merujuk pada penggunaan data empiris, preseden hukum, atau standar profesional untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara adil oleh semua pihak⁶. Dalam konteks pembentukan koalisi politik, prinsip-prinsip ini sangat penting, terutama dalam proses pembagian kekuasaan, pengalokasian kursi kabinet, atau penentuan platform kebijakan bersama. Dengan mengaplikasikan principled negotiation, koalisi yang dibentuk diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan mengurangi potensi konflik internal.

Namun demikian, aplikasi principled negotiation dalam konteks politik juga menghadapi hambatan praktis. Salah satu tantangan terbesar adalah asimetri kekuatan, di mana partai yang lebih besar atau lebih kuat dalam koalisi dapat memaksakan kriteria yang menguntungkan dirinya sendiri, mengurangi kemungkinan terjadinya kesepakatan yang adil. Kurangnya transparansi dalam negosiasi juga dapat menjadi kendala, karena negosiasi tertutup sering kali menimbulkan kecurigaan tentang adanya transaksi politik yang tidak sah atau tersembunyi. Selain itu, kompleksitas isu kebijakan dalam negosiasi koalisi sering kali mempersulit penggunaan kriteria objektif, karena banyak kebijakan yang sulit diukur secara kuantitatif dan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada data empiris yang jelas.

Teori Koalisi Politik

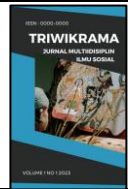
Teori koalisi politik yang dikemukakan oleh William H. Riker (1962) dan Arend Lijphart (1999) memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana koalisi politik dibentuk dan berfungsi dalam sistem politik demokrasi. Riker mengembangkan Size Principle, yang menyatakan bahwa aktor politik cenderung membentuk koalisi sekecil mungkin yang masih cukup untuk meraih mayoritas atau minimal winning coalition (MWC)⁷. Dalam perspektif ini, koalisi dibentuk dengan meminimalkan biaya konsesi dan memaksimalkan keuntungan kekuasaan yang dapat diperoleh

⁶ Lijphart, A. (1977). *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. Yale University Press.h.66

⁷ Lijphart, A. (1968). *The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands*. University of California Press.h.89

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



oleh partai-partai yang terlibat. Riker lebih menekankan pada efisiensi dan keuntungan langsung dari koalisi, yang sering kali terbentuk dengan mengedepankan kepentingan pragmatis daripada kesesuaian ideologis.

Sebaliknya, Arend Lijphart memperkenalkan model consensus democracy, yang menekankan pentingnya inklusi dan power-sharing di negara dengan tingkat fragmentasi etnis atau agama yang tinggi. Dalam model ini, koalisi yang lebih besar dan inklusif dianggap lebih mampu menjaga stabilitas politik dan representasi kelompok-kelompok minoritas. Hal ini sejalan dengan fenomena politik di Indonesia, di mana pembentukan koalisi lebih sering dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik jangka panjang setelah Pemilu, terutama ketika hasil pemilu menghasilkan parlemen yang terfragmentasi.

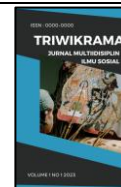
Dalam konteks Pilpres 2024, kedua teori ini berinteraksi. MWC menjelaskan koalisi yang lebih sempit dan pragmatis, yang sering kali terbentuk oleh partai-partai baru yang lebih fokus pada kemenangan cepat dan efisiensi pemerintahan⁸. Sebaliknya, konsosiasionalisme menjelaskan koalisi yang lebih luas, seperti yang terlihat pada koalisi-koalisi besar yang dibentuk untuk menjaga stabilitas pemerintahan meskipun harus mengorbankan sebagian porsi kekuasaan. Dengan demikian, kombinasi kedua model ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika pembentukan koalisi politik di Indonesia, terutama dalam konteks koalisi Pilpres 2024.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam dinamika negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pada Pilpres 2024 di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna-makna subjektif, strategi tersembunyi, serta pertimbangan-pertimbangan politis yang melatarbelakangi keputusan pembentukan koalisi di antara partai-partai politik⁹. Dalam konteks politik Indonesia yang kompleks dan dinamis, pendekatan kualitatif deskriptif menjadi penting untuk menjelaskan fenomena politik yang tidak bisa diukur secara kuantitatif, tetapi harus dipahami dari sudut pandang para pelaku politik itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta empiris, melainkan juga menafsirkan makna-makna yang terkandung di balik dinamika negosiasi politik.

⁸ Irawan, W. (2024). Negosiasi Kolaboratif Dalam Pemilihan Caleg 2024 (Perspektif Pendekatan Hukum dan Komunikasi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12420–12438.h.12

⁹ Setiawan, A. (2021). *Komunikasi Politik untuk Pencitraan: Konsep, Strategi dan Praktik*. Medan: UIN Sumatera Utara h.89

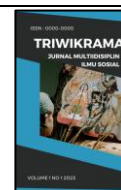


Metode ini menggabungkan dua teknik utama, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen akademik, laporan resmi, berita, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas koalisi politik dan negosiasi dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer langsung dari aktor politik yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Melalui kombinasi kedua teknik ini, penelitian ini berusaha membangun pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai bagaimana strategi, komunikasi, serta dinamika kekuasaan mempengaruhi pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024. Dengan pendekatan ini pula, peneliti berharap mampu memperkaya literatur ilmiah terkait negosiasi politik di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Subjek penelitian ini adalah aktor politik yang terlibat langsung dalam proses negosiasi pembentukan koalisi Pilpres 2024, dengan fokus khusus kepada pengurus Partai Gelora Indonesia. Salah satu informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Tharmizi, Bendahara Wilayah DPW Partai Gelora Provinsi Bengkulu, yang memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dinamika negosiasi berlangsung di tingkat partai politik. Pemilihan subjek ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan koalisi, serta aksesibilitas informasi yang relevan terkait motivasi, strategi, dan tantangan yang dihadapi selama negosiasi politik. Dengan mengambil sudut pandang aktor politik, penelitian ini bertujuan mendapatkan data otentik dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan koalisi.

Objek penelitian ini adalah proses negosiasi politik dalam pembentukan koalisi partai-partai politik pada Pilpres 2024, yang mencakup dinamika komunikasi, kompromi strategis, pertimbangan ideologi, serta kalkulasi elektoral yang dilakukan oleh partai-partai. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana partai-partai politik, melalui interaksi dan negosiasi, membangun kesepakatan untuk mendukung calon presiden tertentu SciELO. (2022). Question of Timing: Pre-Electoral Coalitions in Multiparty Presidential Systems. *Brazilian Political Science Review*, 16(1), e0001. Dengan mengamati proses ini, penelitian berusaha mengungkap strategi komunikasi politik yang digunakan untuk menyatukan kepentingan yang berbeda-beda di dalam



koalisi.¹⁰ Selain itu, penelitian juga berusaha memahami faktor eksternal seperti tekanan publik, media massa, dan peraturan pemilu yang turut mempengaruhi jalannya negosiasi politik tersebut.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama untuk pengumpulan data, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan resmi partai politik, serta dokumen-dokumen terkait Pilpres 2024. Studi literatur ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan konteks empiris mengenai pembentukan koalisi politik, serta untuk memahami perkembangan politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Dengan demikian, data sekunder dari studi literatur menjadi penting sebagai pijakan awal dalam merancang kerangka analisis dan sebagai pembanding dalam menganalisis hasil wawancara.

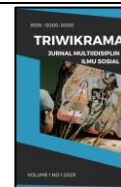
Teknik kedua adalah wawancara mendalam dengan narasumber kunci dari Partai Gelora Indonesia, yaitu Bapak Tharmizi. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi topik lebih dalam sesuai dengan pengalaman dan perspektif narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data primer mengenai motivasi, pertimbangan strategis, proses negosiasi, tantangan, serta refleksi internal partai politik dalam membentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Teknik wawancara mendalam dipilih karena mampu menangkap nuansa subjektif yang tidak dapat diperoleh dari studi literatur saja, seperti emosi, persepsi pribadi, dan dinamika hubungan antar-aktor dalam proses negosiasi.

Analisi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, dengan tahapan-tahapan sistematis untuk memastikan keakuratan dan kekayaan interpretasi. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara ke dalam tema-tema utama seperti motivasi pembentukan koalisi, dinamika negosiasi, tantangan yang dihadapi, dan hasil kesepakatan politik.¹¹ Reduksi data ini penting untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan menyoroti pola-pola tematik yang muncul dari data lapangan maupun dokumen sekunder.

¹⁰ SciELO. (2022). Question of Timing: Pre-Electoral Coalitions in Multiparty Presidential Systems. *Brazilian Political Science Review*, 16(1), e0001. Taylor & Francis Online+2SciELO+2Cambridge University Press & Assessment+2.h.102

¹¹ Irawan, W. (2024). Negosiasi Kolaboratif Dalam Pemilihan Caleg 2024 (Perspektif Pendekatan Hukum dan Komunikasi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12420–12438. J Innovative.h.81



Setelah itu, data yang telah direduksi akan diklasifikasikan dan disusun dalam bentuk narasi tematik yang mudah dianalisis.

Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Data yang telah diklasifikasikan akan disusun dalam narasi tematik, dilengkapi kutipan langsung dari wawancara untuk memperkuat interpretasi. Peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori-teori yang relevan, serta melakukan triangulasi antar sumber data untuk meningkatkan validitas penelitian. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kompleksitas negosiasi politik dalam pembentukan koalisi partai di Pilpres 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

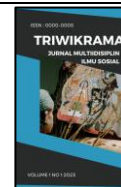
Dinamika koalisi menuju Pilpres 2024 di Indonesia menunjukkan betapa kompleksnya sistem politik multipartai yang ada di negara ini. Koalisi partai politik memainkan peran penting dalam memastikan kesuksesan calon yang mereka dukung, mengingat pemilu ini menjadi salah satu momen krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia. Tiga koalisi utama yang muncul, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM), Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), masing-masing memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda, mencerminkan beragam pendekatan dalam membentuk aliansi guna meraih kemenangan elektoral¹². Proses pembentukan koalisi ini bukan hanya soal elektabilitas, tetapi juga tentang kesepakatan ideologis dan strategi politik yang seringkali harus melalui serangkaian negosiasi panjang, kompromi, dan kalkulasi politik yang cermat.

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 menjadi momen krusial bagi partai-partai besar di Indonesia, di mana pembentukan koalisi politik memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilu. Salah satu dinamika yang menarik perhatian dalam Pilpres 2024 adalah negosiasi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar, dua partai besar dengan sejarah panjang dalam politik Indonesia. Proses negosiasi mereka, yang berfokus pada

¹² Ardiansyah, A., & Elviandri, E. (2024). Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial dan Implikasinya Terhadap Good Government dan Clean Government. *Jurnal Rectum*, 4(1), 15–30.h.25

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com

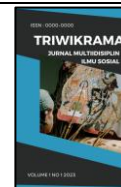


pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, mencerminkan betapa pentingnya pembentukan koalisi dalam mencapai kemenangan elektoral.

Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, adalah koalisi terbesar dalam Pilpres 2024. Koalisi ini terdiri dari partai-partai besar seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB, yang masing-masing memiliki basis massa kuat dan pengalaman politik yang mendalam. Strategi utama KIM adalah menggabungkan kekuatan politik besar yang sudah terbukti memiliki pengaruh kuat di tingkat nasional. Aliansi ini didorong oleh pragmatisme politik, dengan tujuan utama untuk memaksimalkan elektabilitas dengan mendukung calon yang sudah populer dan memiliki basis dukungan yang luas. Prabowo Subianto, sebagai mantan calon presiden yang sudah dikenal luas, dipandang sebagai sosok yang mampu menarik suara dari berbagai kalangan, sementara Gibran, yang merupakan anak Presiden Joko Widodo, dipilih untuk memperkuat elektabilitas di kalangan pemilih muda dan keluarga presiden. Selain itu, aliansi antara partai-partai ini juga memperlihatkan pentingnya saling memperkuat kekuatan politik lokal, dengan Golkar dan PAN memiliki basis kuat di wilayah tertentu, serta PKB yang memiliki pengaruh besar di kalangan kelompok Islam dan pesantren.

Di sisi lain, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang awalnya terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesolidan koalisi. KPP mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Anies, dengan latar belakang sebagai Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai tokoh yang memiliki daya tarik kuat di kalangan urban dan pemilih muda, sementara Muhaimin, sebagai Ketua PKB, mewakili kekuatan politik berbasis pesantren dan kelompok tradisional Islam. Namun, koalisi ini mulai mengalami perpecahan setelah Partai Demokrat menarik dukungan mereka terhadap Muhaimin sebagai calon wakil presiden, yang menyebabkan ketegangan internal dalam koalisi tersebut. Negosiasi ulang mengenai struktur koalisi dan pilihan calon wakil presiden pun tak terhindarkan¹³. Dalam konteks ini, strategi KPP menjadi lebih menonjolkan kompromi ideologis, yang memaksa setiap pihak untuk menerima calon dan kebijakan yang terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan garis ideologi mereka masing-masing. PKS yang lebih condong pada kebijakan Islam konservatif, berhadapan dengan NasDem yang lebih

¹³ Cambridge University Press. (2017). Negotiating under Political Uncertainty: National Elections and the Dynamics of International Cooperation. *British Journal of Political Science*, 47(1), 1–25.h.19



progresif, menciptakan tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh anggota koalisi.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, juga menjadi koalisi yang menonjol dalam Pilpres 2024. Koalisi ini lebih berfokus pada pembaruan politik dengan mengusung figur yang dianggap lebih bersih dan modern. Ganjar, sebagai Gubernur Jawa Tengah, memiliki elektabilitas tinggi berkat kepopulerannya sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan rekam jejak yang bersih. Koalisi ini terdiri dari partai-partai yang cenderung lebih modern dan berbasis di kalangan pemilih muda serta kalangan kelas menengah-atas. Strategi KKIR tidak hanya berfokus pada pencapaian kemenangan elektoral, tetapi juga pada ide-ide pembaruan yang ingin diusung oleh Ganjar. Namun, koalisi ini juga menghadapi tantangan dalam hal menyatukan partai-partai yang memiliki orientasi ideologi yang cukup beragam.¹⁴ Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam hal kebijakan, KKIR berusaha membentuk koalisi yang lebih inklusif dengan fokus pada program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

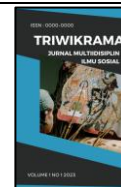
Proses negosiasi antara PDI-P dan Partai Golkar dimulai dengan diskusi mengenai calon presiden yang akan diusung. PDI-P, yang memiliki kekuatan politik yang lebih besar, ingin memastikan bahwa calon presiden yang diusung adalah figur yang dapat mendominasi pemilihan, dengan basis dukungan yang kuat dari pemilih tradisional mereka. Dalam hal ini, PDI-P memilih untuk mengusung calon presiden dari dalam partai mereka sendiri, meskipun ada pertimbangan untuk mengakomodasi partai lain dalam koalisi. Namun, Golkar yang memiliki aspirasi untuk memperkuat pengaruhnya di pemerintahan, merasa bahwa mereka juga perlu memiliki peran penting dalam penentuan calon wakil presiden. Dalam negosiasi ini, terjadi tawar-menawar antara kedua partai mengenai siapa yang akan mengisi posisi wakil presiden. PDI-P, meskipun ingin mempertahankan dominasi mereka, akhirnya sepakat untuk memberi posisi wakil presiden kepada kader Partai Golkar sebagai bagian dari kompromi dalam membentuk koalisi yang lebih kuat.

Pembentukan koalisi dalam Pilpres 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, di antaranya adalah elektabilitas calon. Partai-partai politik cenderung memilih untuk bergabung dengan koalisi yang mendukung calon dengan elektabilitas tinggi, meskipun terkadang ada

¹⁴ *Ibid.*

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



perbedaan ideologis yang cukup signifikan. Koalisi-koalisi besar seperti KIM dan KKIR memanfaatkan popularitas calon presidennya sebagai daya tarik utama untuk menarik partai-partai lain yang memiliki basis dukungan di daerah tertentu. Selain itu, kesamaan ideologi juga menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan koalisi. Meskipun partai-partai seringkali lebih pragmatis dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden, mereka juga harus memperhitungkan kesamaan nilai dan kebijakan agar koalisi tersebut tetap stabil¹⁵. Koalisi yang terbentuk tidak hanya didasarkan pada keuntungan elektoral, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diusung dapat diterima oleh seluruh anggota koalisi.

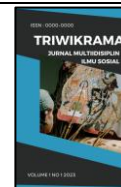
Partai Gelora Indonesia memandang pembentukan koalisi dalam Pilpres 2024 sebagai sebuah langkah yang tidak dapat dihindari. Menurut Tharmizi, pengurus DPW Partai Gelora Provinsi Bengkulu, dalam wawancara ia menyatakan bahwa "sebagai sebuah partai politik tidak mungkin tidak berkoalisi dengan yang lainnya untuk ikut dalam Pilpres 2024." Motivasi utama di balik pembentukan koalisi ini adalah untuk menitipkan program-program dan narasi yang telah disosialisasikan kepada masyarakat kepada calon presiden yang akan diusung. Lebih lanjut, Tharmizi menegaskan bahwa "adapun koalisi ini adalah koalisi di mana kita akan membangun bangsa Indonesia. Sehingga koalisi ini harus satu," menekankan pentingnya kesatuan visi dalam membangun negara melalui koalisi politik.

Dalam wawancara tersebut, Tharmizi juga mengakui secara terbuka bahwa politik dan pembentukan koalisi pada hakikatnya berkaitan dengan kekuasaan. Ia menyatakan, "Koalisi Pilpres ini adalah tentang kekuasaan. Karena partai politik dibuat itu adalah dalam rangka, berserta dalam kekuasaan mengatur negara." Pandangan ini menunjukkan bahwa selain idealisme, ada realitas politik yang menjadi pertimbangan utama dalam membangun koalisi.

Dalam memilih mitra koalisi, Partai Gelora mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu kesatuan visi dan peluang kemenangan. Tharmizi menjelaskan bahwa "mitra koalisi pertama adalah kesatuan visi terhadap membangun negara. Kedua adalah faktor kemenangan." Faktor kemenangan ini dipahami sebagai peluang untuk mengantarkan calon yang diusung menjadi pemenang dalam Pilpres. Ia menambahkan, "Koalisi itu harus bisa menang, memenangkan calon yang akan diusung dalam Pilpres. Dan peluangnya lebih besar dari calon lain."¹⁶

¹⁵ Farid, A. (2024). Implikasi Koalisi Partai Pada Proses Pembentukan Kebijakan Di Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 30–45.h.36

¹⁶ Wawancara dengan Tharmizi, 01 Mei 2025.



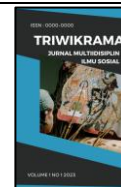
Namun, di dalam proses pembentukan koalisi, terdapat perbedaan pandangan antara elite partai dengan sebagian kader di tingkat bawah. Tharmizi mengakui adanya perbedaan ini, dengan menyatakan bahwa "ada orang yang di satu sisi dia menyukai calon lain. Hal seperti itu sah-sah saja bagi kami di Partai Gelora." Meski demikian, Partai Gelora tetap mengutamakan keputusan partai sebagai pegangan resmi, di mana kader tidak diperbolehkan membawa nama partai untuk mendukung calon lain. Ia menegaskan bahwa "secara partai, tidak bisa dia mengatasnamakan partai. Harus tetap bahwa kebijakan partai itu lebih utama."

Dalam hal pola negosiasi politik, Partai Gelora mengambil langkah yang berbeda dengan tidak melakukan negosiasi dengan partai-partai lain, melainkan langsung dengan calon presiden. Tharmizi menyatakan bahwa "kita tidak bernegosiasi dengan partai lain, kita bernegosiasi langsung dengan calon. Calon presiden yang kita usung ketika itu adalah Bapak Prabowo Subianto." Sebelum melakukan negosiasi eksternal, Partai Gelora terlebih dahulu bermusyawarah secara internal untuk menentukan tema, narasi, dan arah dukungan, yang hasilnya kemudian diserahkan kepada ketua umum, sekretaris jenderal, serta pengurus inti lainnya.

Dinamika dalam proses musyawarah internal partai berlangsung dalam suasana demokratis. Tharmizi menyebutkan bahwa "berbeda pendapat boleh, asalkan pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan dan punya alasan kuat," dengan catatan bahwa pendapat tersebut tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan tetap mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip ini menjadi landasan dalam mengelola perbedaan pandangan di dalam tubuh partai.

Terkait dengan peluang dan hambatan dalam membangun koalisi, Tharmizi menilai bahwa hambatan dalam proses negosiasi adalah hal biasa, seperti negosiasi yang tidak tercapai. Ia mengatakan, "kalau hambatan biasalah. Bahwa ketika negosiasi tidak tercapai, tentu mungkin tidak jadi kita berkoalisi." Selain itu, ia juga menyadari bahwa setiap partai memiliki tujuan masing-masing dalam berkoalisi, dan Partai Gelora menyikapinya dengan santai dan realistis.

Sebagai partai baru, Partai Gelora menyadari tantangan yang dihadapi cukup berat. Tharmizi menjelaskan, "Gelora itu partai baru yang belum mendapatkan kursi di tingkat parlemen DPR RI atau pusat. Sehingga kita juga mengukur diri dan ikut mendukung, tapi tentunya mendukung kita adalah mendukung yang serius." Kesadaran akan posisi sebagai partai baru mendorong Gelora untuk membangun komitmen dukungan yang lebih konsisten dan serius terhadap calon yang didukung.



Dari segi komunikasi internal, koordinasi antara DPP, DPW, dan DPD Partai Gelora berlangsung secara terstruktur, dengan tingkat DPW dan DPD menerima instruksi dari pusat. Tharmizi menuturkan, "kita yang di DPW ataupun yang di DPD sifatnya adalah instruksi. Sedangkan keputusan itu ada di pusat karena kita adalah cabang bukan pusat." Dengan struktur ini, arahan dari pusat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di seluruh tingkat partai.

Keputusan koalisi yang diambil oleh DPP Partai Gelora mendapat respon positif dari kader dan simpatisan di tingkat bawah. Menurut Tharmizi, "rata-rata tidak bermasalah. Artinya kader tingkat bawah itu menerima apa yang telah diputuskan oleh pusat," menunjukkan adanya soliditas internal dalam mendukung keputusan partai.

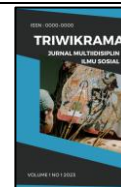
Proses negosiasi dalam pembentukan koalisi pada Pilpres 2024 juga memberikan pelajaran penting bagi Partai Gelora. Tharmizi menyatakan, "pelajaran yang paling berharga adalah negosiasinya itu. Negosiasinya itu adalah cukup berkelas karena masing-masing pihak menyadari peran dan fungsi masing-masing." Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman berinteraksi dalam dinamika politik nasional menjadi modal berharga bagi pengembangan kapasitas politik Partai Gelora ke depan.

Strategi koalisi di masa depan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan bergantung pada kondisi politik yang berkembang. Tharmizi menyampaikan, "kalau strategi itu semuanya tergantung kondisi dan keadaan ketika nanti di 2029 mungkin yang terdekat. Dan itu dinamis sekali," membuka kemungkinan bagi berbagai opsi dalam menentukan arah koalisi ke depan.¹⁷

Terkait dengan harapan terhadap koalisi yang telah dibangun, Partai Gelora berharap dapat memenangkan Pilpres 2024 dan berperan aktif dalam pemerintahan. Tharmizi menyatakan, "harapan kita ya yang terbaik tentunya. Bahwa kita memenangkan Pilpres dan tentunya kita juga ikut masuk dalam kekuasaan, dalam mengatur negara."

Sebagai partai baru yang ingin berperan signifikan dalam koalisi nasional, kunci sukses menurut Tharmizi adalah fokus pada program, menjaga kekompakan, serta membangun komunikasi yang baik dengan calon yang didukung. Ia menegaskan, "kita fokus terhadap program, kita kompak dan berkomunikasi secara baik terhadap calon sehingga tidak menimbulkan efek yang saling menyakitkan." Ia juga menambahkan bahwa perubahan dalam politik adalah sesuatu yang pasti, sehingga fleksibilitas dalam berkoalisi harus dijaga melalui komunikasi yang efektif. Seperti yang ia kutip dari Anis Matta, "koalisi perubahan itu adalah cita-cita, tapi perubahan koalisi itu

¹⁷ Wawancara dengan Tharmizi, 01 Mei 2025.



fakta," menunjukkan bahwa dalam politik, perubahan adalah keniscayaan yang harus disikapi dengan bijaksana.

PEMBAHASAN

Dinamika Koalisi dan Strategi Elektoral

Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, merupakan koalisi terbesar dalam Pilpres 2024. Terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan partai-partai lain, KIM menunjukkan pendekatan berbasis kekuatan elektoral. Strategi utama mereka adalah menggabungkan kekuatan politik yang telah terbukti memiliki basis massa kuat di berbagai wilayah. Prabowo membawa pengalaman dan popularitas nasional, sementara Gibran memberikan akses kepada pemilih muda dan simbol kesinambungan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo¹⁸. Pendekatan ini sangat relevan dengan prinsip *minimal winning coalition* dari teori koalisi politik Riker, di mana partai berusaha membentuk aliansi yang cukup kuat untuk menang tanpa harus berbagi kekuasaan secara berlebihan.

Sebaliknya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang awalnya digawangi oleh NasDem, PKS, dan Demokrat, mengalami ketegangan internal saat harus menentukan pasangan calon. KPP menunjukkan dinamika negosiasi yang intens, yang memerlukan penerapan prinsip-prinsip *principled negotiation* sebagaimana dijelaskan Fisher dan Ury. Ketegangan antara NasDem, PKS, dan Demokrat dalam menentukan cawapres menggambarkan kebutuhan untuk memisahkan "masalah" dari "hubungan antar pihak" serta pentingnya mencari solusi yang saling menguntungkan. Perpecahan yang terjadi akibat penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan memperlihatkan bagaimana ketiadaan kriteria objektif yang disepakati dapat melemahkan stabilitas koalisi.

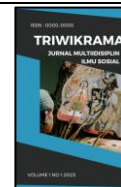
Sementara itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang mendukung Ganjar Pranowo, membangun koalisinya dengan lebih menekankan pada gagasan pembaruan politik dan nilai-nilai integritas. Walaupun partai-partai pendukungnya datang dari latar belakang ideologi yang beragam, mereka berusaha mengutamakan konsensus programatik ketimbang kesamaan ideologis murni¹⁹. Pendekatan ini beresonansi dengan model *consensus democracy* dari Lijphart,

¹⁸ SciELO. (2022). Question of Timing: Pre-Electoral Coalitions in Multiparty Presidential Systems. *Brazilian Political Science Review*, 16(1), e0001.h.50

¹⁹ Rani, S. (2019). Dinamika Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden Di Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 72–85.h75

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



di mana keberagaman digunakan sebagai kekuatan untuk mencapai kesepakatan luas demi stabilitas politik jangka panjang.

Dalam pembentukan koalisi pada Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengadopsi strategi elektoral berbasis kekuatan politik yang sudah mapan, dengan mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pendekatan ini sangat relevan dengan **teori minimal winning coalition** yang dikemukakan oleh William Riker, di mana partai-partai dalam koalisi berusaha membentuk aliansi yang cukup kuat untuk meraih kemenangan tanpa harus membagi kekuasaan secara berlebihan. Sementara itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengalami ketegangan internal dalam menentukan calon wakil presiden, menerapkan **prinsip-prinsip principled negotiation** (Fisher & Ury) dengan fokus pada pemisahan masalah dan hubungan antar pihak. Di sisi lain, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang lebih menekankan pada konsensus programatik dan gagasan pembaruan politik, mencerminkan penerapan **model consensus democracy** dari Arend Lijphart, yang mengedepankan inklusi dan power-sharing untuk mencapai kesepakatan yang lebih stabil.

Perspektif Partai Gelora : Pragmatise dan Negosiasi Politik

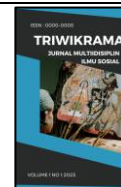
Dalam konteks Pilpres 2024, Partai Gelora Indonesia memilih untuk berkoalisi mendukung Prabowo Subianto. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Tharmizi dalam wawancara,

"Kalau kita mau realistis, jalan perubahan itu harus lewat kekuasaan. Kita harus ikut di dalam pemerintahan, bukan di luar menonton."

Pernyataan ini mencerminkan adopsi prinsip *pragmatisme politik*, di mana keberhasilan politik tidak hanya diukur melalui kesetiaan terhadap prinsip ideologis, tetapi juga dari kemampuan untuk mendapatkan posisi strategis yang memungkinkan implementasi ide-ide perubahan.²⁰ Pilihan Partai Gelora untuk berfokus pada kesepakatan dengan calon presiden ketimbang melakukan negosiasi langsung dengan partai-partai lain memperlihatkan pemahaman bahwa dalam sistem presidensial seperti Indonesia, koalisi personalistik antara partai dan calon kerap kali lebih menentukan dibandingkan koalisi antar partai.

Dalam proses negosiasi internal, Partai Gelora menerapkan mekanisme musyawarah sebagai metode utama pengambilan keputusan. Bapak Tharmizi menyatakan:

²⁰ □ Setiawan, A. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, Repository UMJ, 2021. h.98



"Dalam Gelora, semua keputusan strategis dibahas dulu dalam musyawarah. Tidak ada keputusan satu arah. Semua suara penting, tapi tetap kita utamakan kepentingan partai dan bangsa."

Ini menunjukkan bahwa meskipun pragmatis, Partai Gelora tetap menjaga nilai *principled negotiation* di dalam organisasinya. Setiap keputusan yang diambil bukan hanya mempertimbangkan aspek kemenangan politik, tetapi juga memastikan bahwa narasi perubahan dan pembangunan bangsa tetap menjadi pedoman utama.

Partai Gelora Indonesia, dalam konteks Pilpres 2024, memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dengan fokus pada pragmatisme politik yang lebih mengutamakan posisi strategis dalam pemerintahan daripada kesetiaan terhadap prinsip ideologis murni. Pandangan ini sejalan dengan teori pragmatisme politik yang menekankan pada pencapaian hasil praktis dalam negosiasi politik. Tharmizi, pengurus Partai Gelora, menyatakan bahwa keberhasilan politik di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan partai untuk mendapatkan akses kekuasaan, yang memungkinkan implementasi ide-ide perubahan. Keputusan untuk berfokus pada calon presiden dan menghindari negosiasi langsung dengan partai-partai lain menunjukkan penerapan teori koalisi politik Riker, di mana partai lebih memilih untuk membentuk koalisi dengan calon tertentu, bukan sekadar antar partai, guna memaksimalkan peluang kemenangan elektoral.

Tantangan dan Implikasi bagi Masa Depan

Sebagai partai baru, Partai Gelora menghadapi tantangan ganda: keterbatasan infrastruktur politik dan rendahnya daya tawar dalam parlemen. Bapak Tharmizi mengakui:

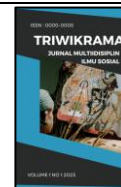
"Kita ini partai baru, suara belum banyak. Tapi kalau kita bisa memainkan posisi dengan tepat, kita tetap bisa jadi bagian penting dalam perubahan."

Hal ini mencerminkan penerapan strategi *political leverage* dalam teori koalisi politik, yakni bagaimana partai kecil tetap bisa memaksimalkan pengaruh melalui penempatan posisi yang strategis dalam koalisi besar. Partai Gelora memandang bahwa keberhasilan dalam Pilpres 2024 akan menjadi batu loncatan untuk memperkuat eksistensi mereka di Pemilu 2029²¹. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika politik nasional menjadi kunci utama keberlanjutan strategi koalisi mereka.

²¹ Moghimifar, F., Li, Y.-F., Thomson, R., & Haffari, G. (2024). Modelling Political Coalition Negotiations Using LLM-based Agents. *arXiv preprint arXiv:2402.11712*.h.32

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Dalam dinamika politik Indonesia yang cair dan cepat berubah, kemampuan untuk melakukan negosiasi berbasis prinsip, menjaga pragmatisme sehat, serta membangun koalisi yang berbasis kepentingan nasional akan menjadi modal penting tidak hanya bagi Partai Gelora, tetapi juga bagi keseluruhan partai politik di Indonesia dalam menyongsong masa depan demokrasi yang lebih matang.

Partai Gelora menghadapi tantangan besar sebagai partai baru dengan terbatasnya infrastruktur politik dan rendahnya daya tawar di parlemen. Namun, mereka tetap mampu menggunakan **strategi political leverage** untuk memainkan posisi yang lebih strategis dalam koalisi besar. Hal ini mencerminkan penerapan teori **koalisi politik** William H. Riker, di mana partai kecil seperti Gelora dapat memaksimalkan pengaruhnya melalui peran yang lebih strategis dalam koalisi besar. Dengan keberhasilan yang diharapkan pada Pilpres 2024, Partai Gelora berambisi untuk memperkuat eksistensinya di Pemilu 2029, menjadikan **fleksibilitas** dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika politik sebagai kunci untuk bertahan dan berkembang.²² Oleh karena itu, dalam menghadapi masa depan demokrasi yang lebih matang, penerapan **negosiasi berbasis prinsip** dan **pragmatisme politik** akan menjadi modal penting bagi Partai Gelora dan seluruh partai politik di Indonesia untuk berkontribusi pada kestabilan politik dan perkembangan demokrasi.

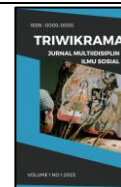
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pada Pilpres 2024 berlangsung melalui serangkaian diskusi dan tawar-menawar antar partai politik yang terlibat. Masing-masing partai mempertimbangkan faktor elektabilitas calon, kesepakatan ideologis, serta pembagian kekuasaan untuk memastikan kemenangan di pemilu. Negosiasi ini melibatkan aktor-aktor politik yang menentukan siapa calon yang diusung, dengan tujuan utama mencapai konsensus yang memungkinkan koalisi tersebut memperoleh dukungan yang cukup dari masyarakat.

Keberhasilan atau kegagalan dalam proses negosiasi koalisi pada Pilpres 2024 sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai-partai politik untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan posisi strategis. Faktor-faktor seperti kesatuan visi, dukungan elektoral, serta kompromi terkait calon yang akan diusung mempengaruhi kelancaran negosiasi.

²² Wiley Online Library. (2015). How and When Do Presidents Influence the Duration of Coalition Negotiations? *European Journal of Political Research*, 54(4), 1–25. eJPR. H.54



Sebaliknya, perbedaan ideologi yang signifikan dan ketegangan internal antar partai sering menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pola negosiasi politik yang semakin pragmatis dan fleksibel di Pilpres 2024 membawa implikasi besar bagi dinamika demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. Pembentukan koalisi yang berfokus pada kalkulasi elektabilitas dan pembagian kekuasaan menunjukkan adanya pergeseran dari koalisi berbasis ideologi menuju koalisi berbasis kepentingan praktis. Hal ini berpotensi memperlemah stabilitas politik dan mengurangi legitimasi partai-partai politik di mata publik, meskipun juga dapat mempercepat pembentukan pemerintahan yang lebih efisien.

Saran

Sebagai saran, ke depan partai-partai politik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses negosiasi pembentukan koalisi. Keterbukaan informasi kepada publik serta pelibatan masyarakat sipil dalam proses politik dapat memperkuat legitimasi koalisi.

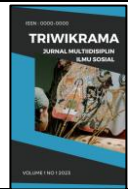
5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lijphart, A. (1968). *The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands*. University of California Press.
- Lijphart, A. (1977). *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. Yale University Press.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Setiawan, A. (2021). *Komunikasi Politik untuk Pencitraan: Konsep, Strategi dan Praktik*. Medan: UIN Sumatera Utara. UINSU Repository.
- Setiawan, A. (2021). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. Repository UMJ.

Jurnal

- Ardiansyah, A., & Elviandri, E. (2024). Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial dan Implikasinya Terhadap Good Government dan Clean Government. *Jurnal Rectum*, 4(1), 15-30. Jurnal Darma Agung.



- Cambridge University Press. (2017). Negotiating under Political Uncertainty: National Elections and the Dynamics of International Cooperation. *British Journal of Political Science*, 47(1), 1-25. Cambridge University Press & Assessment.
- Farid, A. (2024). Implikasi Koalisi Partai Pada Proses Pembentukan Kebijakan Di Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 30-45. journal.walisongo.ac.id.
- Irawan, W. (2024). Negosiasi Kolaboratif Dalam Pemilihan Caleg 2024 (Perspektif Pendekatan Hukum dan Komunikasi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12420-12438. J Innovative.
- Rani, S. (2019). Dinamika Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden Di Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 72-85. Jurnal UIN Antasari.
- Sage Journals. (2022). International Negotiations in the Shadow of Elections. *Journal of Conflict Resolution*, 66(1), 1-25. SAGE Journals+1JSTOR+1.
- SciELO. (2022). Question of Timing: Pre-Electoral Coalitions in Multiparty Presidential Systems. *Brazilian Political Science Review*, 16(1), e0001. Taylor & Francis Online+2SciELO+2Cambridge University Press & Assessment+2.
- Wiley Online Library. (2015). How and When Do Presidents Influence the Duration of Coalition Negotiations? *European Journal of Political Research*, 54(4), 1-25. eJPR.

Website

- Moghimifar, F., Li, Y.-F., Thomson, R., & Haffari, G. (2024). Modelling Political Coalition Negotiations Using LLM-based Agents. *arXiv preprint arXiv:2402.11712*. arXiv. Retrieved on May 18, 2025, at 15:45.
- Putri, A. K., & Wahyuni, R. (2024). Komunikasi Negosiasi Wajah Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan Menuju Pemilihan Presiden 2024. *ResearchGate*. Retrieved on May 18, 2025, at 16:10.